

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

|              |        |
|--------------|--------|
| Media Online |        |
| Media Cetak  | Kompas |

# Mengusut Penjarah Blok C Rusunawa Marunda

JAKARTA, KOMPAS — Sejak akhir tahun lalu terjadi penjarahan aset-aset Blok C Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Blok C1-Blok C5 Rusunawa Marunda dijarah setelah 451 keluarga direlokasi ke Rusun Nagrak dan Rusun Padat Karya pertengahan tahun 2023. Warga direlokasi lantaran seluruh blok dinyatakan tidak layak huni berdasarkan inspeksi bangunan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional pada 2021 dan plang nama Blok C5 ambruk pada 30 Agustus 2023.

Kondisi blok yang kosong dimanfaatkan penjarah. Mereka menggondol *railing* atau terali tangga, pagar pembatas, pintu, jendela, kaca, besi hidran pipa, kabel, sakelar, pagar, dan *rolling door* atau pintu geser dari seluruh blok.

Pada Rabu (19/6/2024) hanya tersisa jejak penjarahan di Blok C Rusunawa Marunda. Dari luar tidak ada lagi jendela pada ratusan unit hunian. Sama dengan kios di lantai dasar yang kehilangan pintu geser. Dari lantai dasar ini terlihat pecahan dan retakan pada tembok yang kehilangan pagar pembatas. Kondisi serupa terjadi pada tangga-tangga tanpa terali.

Unit-unit hunian juga tanpa pintu masuk, pintu kamar mandi, dan pintu kamar tidur. Seluruh instalasi listriknya hilang menyisakan bolong di dinding.

"*Rolling door*-nya habis," ujar seorang pedagang berusia 45 tahun dari salah satu kios yang tersisa di Blok C.

Di situ hanya tersisa dua kios yang masih utuh. Selebihnya tinggal tembok tanpa pintu geser dan instalasi listrik. "Kios aman karena *naomona*. Jangan

diganggu warung ibu. Ibu, kan, baik sama kalian," ujarnya.

Penjual yang enggan disebut namanya ini menyaksikan penjarahan beraksi pada siang dan malam hari. Mereka terdiri atas warga sekitar rusunawa dan warga luar yang datang membawa gerobak, sepeda motor, dan mobil angkut.

Seingatnya, penjarahan terakhir berlangsung pada awal tahun ini. Waktu itu, mereka membongkar besi dari saluran air. "Mereka orang luar, bukan rusunawa ini. Mereka datang, terus berantem sama petugas keamanan. Tetapi, ada yang bilang mereka dapat izin dari orang kantor. Sekarang sudah pada diganti," ucapnya.

Orang kantor yang dimaksud adalah unit pengelola Rusunawa Marunda. Sementara aksi penjarahan menyerang petugas keamanan terjadi pada Selasa (2/1). Mereka mengeroyok petugas keamanan dan merusak fasilitas kantor pengelola rusunawa.

Kejadian itu berawal dari petugas keamanan menangkap basah penjarah di salah satu hunian Blok C, Minggu (31/12/2023). Terjadi cekcok di antara keduanya karena penjarah tak mengindahkan peringatan petugas keamanan.

Buntutnya petugas keamanan membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Utara dengan nomor LP/B/2/1/2024/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA pada Rabu (3/1).

Rusunawa Marunda terdiri atas Blok A-Blok D dengan empat pintu masuk utama. Pengamanannya terbagi dalam 8 pos dan 21 petugas keamanan

bergantian berjaga dalam tiga sif setiap hari.

Kepala petugas keamanan Rusunawa Marunda Carman memastikan petugas keamanan yang ada berupaya mencegah penjarah. Akan tetapi, area rusun terlalu luas, banyak akses masuk, dan sebagian pagar rusunawa rusak atau jebol. "Banyak akses masuk. Rusun ini penduduknya dari berbagai macam suku. Jadi kami tidak bisa menebak malingnya," katanya.

Setelah terungkapnya penjarahan ini, Unit Pengelola Rumah Susun II selaku pengelola Rusunawa Marunda berencana memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap blok. Petugas keamanan juga akan dilengkapi alat patroli yang dapat memantau pergerakannya.

Secara terpisah, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan sudah memantau penjarahan ini. Pemerintah daerah juga telah melapor kepada polisi agar penjarah ditindak. "Sudah koordinasi dengan polres dan polsek setempat. Harus ditindak karena melanggar hukum," ujarnya.

Sehubungan dengan penjarahan Rusunawa Marunda ini, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, meminta pemerintah daerah tidak ragu-ragu mengambil langkah hukum. Sebab, penjarahan ini menjadi preseden buruk yang merusak karakter berbangsa dan bermasyarakat.

"Komisi D akan meminta penjelasan rinci dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan agar masalah ini terang benđerang. Pihak yang terlibat ha-

rus bertanggung jawab," katanya.

## Aset tak terkelola

Penjarahan dan pendudukan aset daerah bukan sekali dua kali terjadi di Jakarta. Arsip *Kompas* pada September 2000 memberitakan lingkungan dan bangunan cagar budaya di Jakarta merupakan aset dan potensi tak ternilai harganya. Namun, warisan budaya yang terbangun banyak terbengkalai atau dihancurkan akibat pembangunan lingkungan binaan baru. Contohnya, bekas Gedung Imigrasi di Jalan Teuku Umar No 1 Jakarta Pusat yang dibangun pada awal abad ke-20.

Saat ini, dari 1.281 bangunan yang tercatat, 564 bangunan masih belum jelas siapa yang menduduki saat ini. Pengguna bangunan warisan zaman pendudukan Belanda itu wajib memiliki surat izin penghunian (SIP) yang diperbarui dua tahun sekali. Sebelum diserahkan pencatatannya pada 1965 kepada Pemprov DKI, bangunan itu dikelola Kementerian Sosial.

Di luar 564 bangunan yang belum jelas penggunanya, 62 unit di antaranya dikelola Panitia Pelaksanaan Penguasaan Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Belanda, 70 gedung dipakai Kementerian Pekerjaan Umum, 35 unit digunakan perusahaan negara, 86 unit digunakan perusahaan swasta, 23 bangunan dikuasai yayasan swasta, 53 unit dikelola presidium kabinet, 429 bangunan diduduki perseorangan, dan 10 bangunan dikelola Pemprov DKI yang sebelumnya berstatus milik kota praja. (DAN)